

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Jambi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TRIWULAN I		KETERANGAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN I		KETERANGAN
					REALISASI	%				REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,7	Penilaian dari BPKP dan Tim Pemerintah Provinsi Jambi	-			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	25.338.739.129	4.497.357.736	17,75%	
		Indeks Reformasi Hukum	70	Penilaian dari KEMENKUMHAM RI	-			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	6.639.931.839	479.323.799	7,22%	
		Nilai SAKIP	68,35	Penilaian dari KEMENPAN RB				Penataan Administrasi Pemerintahan	671.629.917	139.535.720	20,78%	
		Indeks Pelayanan Publik	3,9	Penilaian dari KEMENPAN RB				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5.043.790.339	142.426.779	2,82%	
2	Meningkatkan Kualitas BUMD dan BLUD dalam Kategori Sehat	Persentase Tingkat Kesehatan BUMD dan BLUD	75%	Jumlah BUMD/BLUD dengan Kategori sehat dibagi Jumlah BUMD dan BLUD x 100%				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	924.511.583	197.361.300	21,35%	
								Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.005.407.000	3.802.727.500	22,36%	
								Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16.530.410.000	3.790.368.300	22,93%	
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	237.500.000	6.179.600	2,60%	
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	237.497.000	6.179.600	2,60%	
								Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	875.160.290	92.197.710	10,53%	
								Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	222.216.000	27.050.000	12,17%	
								Fasilitasi Bantuan Hukum	452.868.110	40.103.600	8,86%	
								Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	200.076.180	25.044.110	12,52%	
								Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	818.240.000	123.108.727	15,05%	
								Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	347.280.000	38.915.820	11,21%	
								Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	290.960.000	50.363.539	17,31%	
								Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	180.000.000	33.829.368	18,79%	
								Program Perekonomian dan Pembangunan	1.809.859.950	383.025.008	21,16%	
								Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	520.109.950	68.477.693	13,17%	
								Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	172.829.950	49.592.693	28,69%	
								Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	170.000.000	9.345.000	5,50%	
								Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	177.280.000	9.540.000	5,38%	
								Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	80.000.000	25.895.000	32,37%	
								Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	80.000.000	25.895.000	32,37%	
								Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.104.750.000	284.707.315	25,77%	
								Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	330.150.000	60.963.757	18,47%	
								Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	461.000.000	192.070.044	41,66%	
								Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	313.600.000	31.673.514	10,10%	
								Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	105.000.000	3.945.000	3,76%	
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	105.000.000	3.945.000	3,76%	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.696.970.315	8.617.638.236	19,28%	
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.740.000	51.763.765	25,04%	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.080.000	26.010.200	17,81%	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.660.000	25.753.565	42,46%	
								Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.616.767.981	2.813.219.758	14,34%	

Uraian Permasalahan : 1. Belum optimalnya pengawasan mekanisme penganggaran program/kegiatan pada dokumen perencanaan dipedomani; 2. Belum terintegrasi dengan baik pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga menghambat penghimpunan data dan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia ASN yang ideal dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi; 4. Tuntutan akuntabilitas perlu pertanggungjawaban administratif pemerintahan dan pembangunan yang berbasis kinerja aparatur; 5. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan internal untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Instansi yang dipimpin sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai secara optimal, Melakukan peningkatan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Kota Jambi dengan dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah, Melakukan Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan, Melakukan monitoring evaluasi (MONEV) secara rutin pada setiap triwulan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi, Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi ASN dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi.

 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

H.A. Ridwan, M.Si
Pembina Utama Madya
196611071985121001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Jambi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TRIWULAN II		KETERANGAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KETERANGAN
					REALISASI	%				REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,7	Penilaian dari BPKP dan Tim Pemerintah Provinsi Jambi	-			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	25.338.739.129	4.939.065.092	19,49%	
		Indeks Reformasi Hukum	70	Penilaian dari KEMENKUMHAM RI	-			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	6.639.931.839	776.933.662	11,70%	
		Nilai SAKIP	68,35	Penilaian dari KEMENPAN RB				Penataan Administrasi Pemerintahan	671.629.917	173.154.505	25,78%	
		Indeks Pelayanan Publik	3,9	Penilaian dari KEMENPAN RB				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5.043.790.339	411.343.251	8,16%	
2	Meningkatkan Kualitas BUMD dan BLUD dalam Kategori Sehat	Persentase Tingkat Kesehatan BUMD dan BLUD	75%	Jumlah BUMD/BLUD dengan Kategori sehat dibagi Jumlah BUMD dan BLUD x 100%				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	924.511.583	192.435.906	20,81%	
								Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.005.407.000	3.881.310.500	22,82%	
								Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16.530.410.000	3.767.883.900	22,79%	
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	237.500.000	57.935.000	24,39%	
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	237.497.000	55.491.600	23,37%	
								Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	875.160.290	90.643.479	10,36%	
								Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	222.216.000	29.698.679	13,36%	
								Fasilitasi Bantuan Hukum	452.868.110	43.475.100	9,60%	
								Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	200.076.180	17.469.700	8,73%	
								Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	818.240.000	190.177.451	23,24%	
								Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	347.280.000	137.242.902	39,52%	
								Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	290.960.000	34.435.349	11,84%	
								Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	180.000.000	18.499.200	10,28%	
								Program Perekonomian dan Pembangunan	1.809.859.950	412.772.280	22,81%	
								Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	520.109.950	143.610.929	27,61%	
								Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	172.829.950	53.844.759	31,15%	
								Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	170.000.000	50.064.006	29,45%	
								Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	177.280.000	39.702.164	22,40%	
								Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	80.000.000	18.759.800	23,45%	
								Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	80.000.000	18.759.800	23,45%	
								Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.104.750.000	238.478.702	21,59%	
								Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	330.150.000	98.305.114	29,78%	
								Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	461.000.000	23.397.000	5,08%	
								Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	313.600.000	116.776.588	37,24%	
								Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	105.000.000	11.922.849	11,36%	
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	105.000.000	11.922.849	11,36%	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.696.970.315	10.891.086.614	24,37%	
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.740.000	39.535.180	19,12%	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.080.000	21.701.700	14,86%	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.660.000	17.833.480	29,40%	
								Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.616.767.981	6.562.579.082	33,45%	

Uraian Permasalahan : 1. Belum optimalnya pengawasan mekanisme penganggaran program/kegiatan pada dokumen perencanaan dipedomani; 2. Belum terintegrasi dengan baik pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga menghambat penghimpunan data dan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia ASN yang ideal dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi; 4. Tuntutan akuntabilitas perlu pertanggungjawaban administratif pemerintahan dan pembangunan yang berbasis kinerja aparatur; 5. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan internal untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Instansi yang dipimpin sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai secara optimal, Melakukan peningkatan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Kota Jambi dengan dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah, Melakukan Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan, Melakukan monitoring evaluasi (MONEV) secara rutin pada setiap triwulan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi, Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi ASN dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi.



SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

H. A. Ridwan, M.Si
Pembina Utama Madya
196611071985121001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Jambi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TRIWULAN III		KETERANGAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN III		KETERANGAN
					REALISASI	%				REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,7	Penilaian dari BPKP dan Tim Pemerintah Provinsi Jambi	-			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	25.338.739.129	7.810.546.934	30,82%	
		Indeks Reformasi Hukum	70	Penilaian dari KEMENKUMHAM RI	-			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	6.639.931.839	2.425.144.932	36,52%	
		Nilai SAKIP	68,35	Penilaian dari KEMENPAN RB				Penataan Administrasi Pemerintahan	671.629.917	142.677.350	21,24%	
		Indeks Pelayanan Publik	3,9	Penilaian dari KEMENPAN RB				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5.043.790.339	2.119.873.367	42,03%	
2	Meningkatkan Kualitas BUMD dan BLUD dalam Kategori Sehat	Persentase Tingkat Kesehatan BUMD dan BLUD	75%	Jumlah BUMD/BLUD dengan Kategori sehat dibagi Jumlah BUMD dan BLUD x 100%				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	924.511.583	162.594.215	17,59%	
								Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.005.407.000	4.772.637.802	28,07%	
								Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16.530.410.000	4.723.295.451	28,57%	
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	237.500.000	29.431.100	12,39%	
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	237.497.000	19.911.251	8,38%	
								Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	875.160.290	376.904.923	43,07%	
								Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	222.216.000	49.362.175	22,21%	
								Fasilitasi Bantuan Hukum	452.868.110	214.088.965	47,27%	
								Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	200.076.180	113.453.783	56,71%	
								Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	818.240.000	235.859.277	28,83%	
								Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	347.280.000	49.901.404	14,37%	
								Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	290.960.000	146.267.982	50,27%	
								Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	180.000.000	39.689.891	22,05%	
								Program Perekonomian dan Pembangunan	1.809.859.950	454.172.334	25,09%	
								Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	520.109.950	124.190.572	23,88%	
								Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	172.829.950	18.331.151	10,61%	
								Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	170.000.000	43.095.000	25,35%	
								Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	177.280.000	62.764.421	35,40%	
								Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	80.000.000	27.987.000	34,98%	
								Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	80.000.000	27.987.000	34,98%	
								Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.104.750.000	279.093.807	25,26%	
								Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	330.150.000	133.284.943	40,37%	
								Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	461.000.000	84.615.295	18,35%	
								Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	313.600.000	61.193.569	19,51%	
								Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	105.000.000	22.900.955	21,81%	
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	105.000.000	22.900.955	21,81%	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.696.970.315	9.926.947.286	22,21%	
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.740.000	50.942.207	24,64%	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.080.000	42.440.207	29,05%	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.660.000	8.502.000	14,02%	
								Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.616.767.981	4.098.488.270	20,89%	

Uraian Permasalahan : 1. Belum optimalnya pengawasan mekanisme penganggaran program/kegiatan pada dokumen perencanaan dipedomani; 2. Belum terintegrasi dengan baik pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga menghambat penghimpunan data dan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia ASN yang ideal dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi; 4. Tuntutan akuntabilitas perlu pertanggungjawaban administratif pemerintahan dan pembangunan yang berbasis kinerja aparatur; 5. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan internal untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Instansi yang dipimpin sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai secara optimal, Melakukan peningkatan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Kota Jambi dengan dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah, Melakukan Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan, Melakukan monitoring evaluasi (MONEV) secara rutin pada setiap triwulan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi, Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi ASN dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi.

 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

H.A. Ridwan, M.Si
Pembina Utama Madya
196611071985121001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Jambi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TRIWULAN IV		KETERANGAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN IV		KETERANGAN
					REALISASI	%				REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1200,00%	13
1	Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,7	Penilaian dari BPKP dan Tim Pemerintah Provinsi Jambi	-		Nilai belum dikeluarkan oleh BPKP dan Tim Pemerintah Provinsi Jambi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	25.338.739.129	6.013.952.204	23,73%	
		Indeks Reformasi Hukum	70	Penilaian dari KEMENKUM HAM RI	-		Nilai belum dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM RI	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	6.639.931.839	1.392.602.492	20,97%	
		Nilai SAKIP	68,35	Penilaian dari KEMENPAN RB	68,64	100%		Penataan Administrasi Pemerintahan	671.629.917	206.600.208	30,76%	
		Indeks Pelayanan Publik	3,9	Penilaian dari KEMENPAN RB	3,96	100%		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5.043.790.339	819.250.705	16,24%	
2	Meningkatkan Kualitas BUMD dan BLUD dalam Kategori Sehat	Persentase Tingkat Kesehatan BUMD dan BLUD	75%	Jumlah BUMD/BLUD dengan Kategori sehat dibagi Jumlah BUMD dan BLUD x 100%	66,50%	89%		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	924.511.583	366.751.579	39,67%	
								Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.005.407.000	4.102.298.706	24,12%	
								Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16.530.410.000	3.815.764.056	23,08%	
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	237.500.000	138.914.350	58,49%	
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	237.497.000	147.620.300	62,16%	
								Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	875.160.290	286.602.491	32,75%	
								Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	222.216.000	103.501.491	46,58%	
								Fasilitasi Bantuan Hukum	452.868.110	144.120.235	31,82%	
								Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	200.076.180	38.980.765	19,48%	
								Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	818.240.000	232.448.515	28,41%	
								Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	347.280.000	111.923.974	32,23%	
								Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	290.960.000	39.195.752	13,47%	
								Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	180.000.000	81.328.789	45,18%	
								Program Perekonomian dan Pembangunan	1.809.859.950	540.992.479	29,89%	
								Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	520.109.950	176.349.073	33,91%	
								Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	172.829.950	49.440.923	28,61%	
								Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	170.000.000	67.180.900	39,52%	
								Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	177.280.000	59.727.250	33,69%	
								Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	80.000.000	5.550.000	6,94%	
								Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	80.000.000	5.550.000	6,94%	
								Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.104.750.000	294.319.545	26,64%	
								Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	330.150.000	32.911.400	9,97%	
								Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	461.000.000	158.528.400	34,39%	
								Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	313.600.000	102.879.745	32,81%	
								Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	105.000.000	64.773.861	61,69%	
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	105.000.000	64.773.861	61,69%	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.696.970.315	13.249.843.631	29,64%	
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.740.000	62.226.269	30,10%	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.080.000	54.351.269	37,21%	

							Pendokumentasian Tugas Pimpinan	210.240.793	48.401.000	23,02%
Total Anggaran								71.845.569.394	19.804.788.314	27,57%

Faktor Pendorong : Adanya komitmen, dukungan dan pimpinan yang memberikan arahan dan kebijakan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan serta Komunikasi yang baik antar stakeholder terkait (instansi/Perangkat Daerah)

Uraian Permasalahan : 1. Belum optimalnya pengawasan mekanisme penganggaran program/kegiatan pada dokumen perencanaan dipedomani; 2. Belum terintegrasi dengan baik pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga menghambat penghimpunan data dan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia ASN yang ideal dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi; 4. Tuntutan akuntabilitas perlu pertanggungjawaban administratif pemerintahan dan pembangunan yang berbasis kinerja aparatur; 5. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan internal untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Instansi yang dipimpin sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai secara optimal, Melakukan peningkatan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Kota Jambi dengan dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah, Melakukan Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan, Melakukan monitoring evaluasi (MONEV) secara rutin pada setiap triwulan dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi, Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi ASN dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi.


 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

 H.A. Ridwan, M.Si
 Pembina Utama Madya
 196611071985121001



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 659TAHUN 2024

TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024;
- b. bahwa hasil evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024, telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672);
4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 238 tentang Penetapan Unit Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Lampiran
Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 659 Tahun 2024

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

A. PROVINSI

No	DAFTAR PROVINSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
1.	Provinsi Jawa Barat	4,63	4,81	4,84	4,76	A
2.	Provinsi Jawa Timur	4,75	4,59	4,54	4,63	A
3.	Provinsi D.I. Yogyakarta	4,62	4,64	4,59	4,62	A
4.	Provinsi Sumatera Selatan	4,37	4,67	4,76	4,60	A
5.	Provinsi Kalimantan Selatan	4,52	4,61	4,54	4,56	A
6.	Provinsi Jawa Tengah	4,46	4,62	4,52	4,53	A

No	DAFTAR PROVINSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
7.	Provinsi DKI Jakarta	4,63	4,59	4,37	4,53	A
8.	Provinsi Aceh	4,51	4,65	4,19	4,45	A-
9.	Provinsi NTB	4,33	4,63	4,3	4,42	A-
10.	Provinsi Bali	4,11	4,65	4,46	4,41	A-
11.	Provinsi Sulawesi Tengah	4,46	3,97	4,59	4,34	A-
12.	Provinsi Kalimantan Barat	4,11	4,35	4,33	4,26	A-
13.	Provinsi Kepulauan Riau	3,92	4,22	4,65	4,26	A-
14.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	4,52	4,31	3,86	4,23	A-
15.	Provinsi Kalimantan Utara	3,94	4,51	4,21	4,22	A-
16.	Provinsi Sulawesi Utara	3,72	4,52	4,37	4,20	A-
17.	Provinsi Lampung	4,04	4,11	4,26	4,14	A-
18.	Provinsi Riau	3,79	4,28	4,3	4,12	A-
19.	Provinsi Sulawesi Selatan	3,96	4,54	3,86	4,12	A-
20.	Provinsi Gorontalo	4,12	4,2	3,79	4,04	A-
21.	Provinsi Bengkulu	3,54	3,82	4,45	3,94	B
22.	Provinsi Sumatera Utara	4,07	3,72	3,9	3,90	B
23.	Provinsi Kalimantan Timur	3,08	4,24	3,93	3,75	B
24.	Provinsi Banten	3,63	4,22	3,35	3,73	B
25.	Provinsi Sumatera Barat	2,83	4,49	3,59	3,64	B

No	DAFTAR PROVINSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
26.	Provinsi Jambi	3,24	4,21	3,57	3,67	B
27.	Provinsi NTT	3,33	4,07	3,28	3,56	B
28.	Provinsi Papua Barat	*NA	3,25	3,39	3,32	B-
29.	Provinsi Sulawesi Barat	3,23	3,92	2,81	3,32	B-
30.	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,32	3,91	2,25	2,83	C
31.	Provinsi Maluku Utara	2,49	3,7	2,22	2,80	C
32.	Provinsi Kalimantan Tengah	2,71	3,03	2,27	2,67	C
33.	Provinsi Maluku	4,63	2,34	1,36	2,18	C-

B. KOTA

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
1.	Kota Surakarta	4,77	4,51	4,79	4,69	A
2.	Kota Bandung	4,83	4,45	4,77	4,68	A
3.	Kota Madiun	4,63	4,63	4,64	4,67	A
4.	Kota Depok	4,64	4,73	4,73	4,67	A
5.	Kota Palembang	4,45	4,89	4,64	4,66	A
6.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4,61	4,76	4,6	4,66	A
7.	Kota Denpasar	4,52	4,71	4,74	4,66	A
8.	Kota Bogor	4,62	4,72	4,62	4,65	A
9.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4,59	4,67	4,69	4,65	A
10.	Kota Salatiga	4,71	4,51	4,64	4,62	A
11.	Kota Sukabumi	4,6	4,66	4,59	4,62	A
12.	Kota Magelang	4,73	4,68	4,43	4,61	A
13.	Kota Metro	4,32	4,70	4,79	4,60	A
14.	Kota Kotamobagu	4,42	4,74	4,62	4,59	A
15.	Kota Bekasi	4,56	4,55	4,63	4,58	A
16.	Kota Cimahi	4,76	4,36	4,62	4,58	A

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
17.	Kota Surabaya	4,4	4,44	4,63	4,57	A
18.	Kota Malang	4,55	4,69	4,73	4,57	A
19.	Kota Banjarmasin	4,58	4,49	4,55	4,54	A
20.	Kota Yogyakarta	4,02	4,83	4,75	4,53	A
21.	Kota Pasuruan	4,57	4,63	4,38	4,53	A
22.	Kota Blitar	4,6	4,28	4,68	4,52	A
23.	Kota Banjar	4,56	4,55	4,45	4,52	A
24.	Kota Medan	4,33	4,50	4,69	4,51	A
25.	Kota Banjarbaru	4,2	4,64	4,67	4,50	A-
26.	Kota Payakumbuh	4,51	4,48	4,51	4,50	A-
27.	Kota Tomohon	4,37	4,57	4,55	4,50	A-
28.	Kota Administrasi Jakarta Timur	4,42	4,64	4,41	4,49	A-
29.	Kota Tegal	4,26	4,68	4,52	4,49	A-
30.	Kota Mataram	4,42	4,55	4,46	4,48	A-
31.	Kota Bitung	4,39	4,51	4,52	4,47	A-
32.	Kota Manado	4,18	4,74	4,46	4,46	A-
33.	Kota Prabumulih	4,43	4,49	4,45	4,46	A-
34.	Kota Singkawang	4,46	4,51	4,4	4,46	A-
35.	Kota Lubuklinggau	4,25	4,55	4,52	4,44	A-
36.	Kota Semarang	4,17	4,74	4,39	4,43	A-

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
37.	Kota Tanjungpinang	4,21	4,50	4,48	4,40	A-
38.	Kota Gunungsitoli	4,65	*NA	4,13	4,39	A-
39.	Kota Administrasi Jakarta Utara	4,41	4,38	4,38	4,39	A-
40.	Kota Banda Aceh	3,93	4,48	4,73	4,38	A-
41.	Kota Tangerang	4,37	4,42	4,26	4,35	A-
42.	Kota Pontianak	4,09	4,49	4,46	4,35	A-
43.	Kota Bandar Lampung	3,9	4,47	4,61	4,33	A-
44.	Kota Administrasi Jakarta Barat	4,56	3,93	4,48	4,32	A-
45.	Kota Pariaman	4,22	4,21	4,52	4,32	A-
46.	Kota Tasikmalaya	4,1	4,55	4,25	4,30	A-
47.	Kota Pekalongan	4,44	4,10	4,33	4,29	A-
48.	Kota Bontang	4,19	4,39	4,27	4,28	A-
49.	Kota Samarinda	3,71	4,52	4,54	4,26	A-
50.	Kota Pekanbaru	3,79	4,17	4,79	4,25	A-
51.	Kota Tangerang Selatan	4,17	4,39	4,19	4,25	A-
52.	Kota Cilegon	4,21	4,12	4,35	4,23	A-
53.	Kota Kediri	3,91	4,35	4,35	4,20	A-
54.	Kota Batam	4,22	4,37	4	4,20	A-
55.	Kota Mojokerto	3,8	4,24	4,54	4,19	A-

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
56.	Kota Balikpapan	4,23	3,91	4,43	4,19	A-
57.	Kota Padang Panjang	3,51	4,45	4,56	4,17	A-
58.	Kota Probolinggo	3,96	4,26	4,23	4,15	A-
59.	Kota Tebing Tinggi	3,95	3,95	4,55	4,15	A-
60.	Kota Pangkalpinang	4	4,08	4,36	4,15	A-
61.	Kota Kupang	3,8	4,35	4,29	4,15	A-
62.	Kota Bukittinggi	3,62	4,44	4,33	4,13	A-
63.	Kota Tarakan	3,76	4,43	4,06	4,08	A-
64.	Kota Solok	3,9	*NA	4,26	4,08	A-
65.	Kota Binjai	3,71	4,11	4,2	4,01	A-
66.	Kota Ambon	4,16	*NA	3,84	4,00	B
67.	Kota Serang	4,08	3,73	4,15	3,99	B
68.	Kota Pagar Alam	3,72	4,12	4,12	3,99	B
69.	Kota Cirebon	4,23	3,27	4,4	3,97	B
70.	Kota Jambi	3,89	3,45	4,55	3,96	B
71.	Kota Bengkulu	3,04	4,48	4,34	3,95	B
72.	Kota Lhokseumawe	3,8	*NA	4,07	3,94	B
73.	Kota Langsa	3,56	4,26	3,76	3,86	B
74.	Kota Padangsidempuan	3,91	3,73	3,93	3,86	B
75.	Kota Dumai	3,81	3,85	3,85	3,84	B

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
76.	Kota Subulussalam	3,67	4,21	3,67	3,82	B
77.	Kota Palu	3,08	3,73	4,33	3,78	B
78.	Kota Sabang	3,45	2,76	4,37	3,77	B
79.	Kota Batu	3,16	3,55	4,36	3,76	B
80.	Kota Sibolga	3,04	3,85	4	3,75	B
81.	Kota Palangkaraya	4,44	*NA	3,92	3,71	B
82.	Kota Bima	3,77	4,26	3,72	3,67	B
83.	Kota Padang	2,98	3,52	3,67	3,44	B-
84.	Kota Kendari	2,87	4,12	3,9	3,44	B-
85.	Kota Baubau	2,9	3,68	3,48	3,31	B-
86.	Kota Makassar	3,1	2,51	3,49	3,21	B-
87.	Kota Pare-Pare	2,88	3,03	4,39	3,16	B-
88.	Kota Tanjungbalai	3,26	3,56	3,47	3,14	B-
89.	Kota Gorontalo	2,99	2,69	2,64	3,13	B-
90.	Kota Sorong	3,06	2,78	2,58	2,90	C
91.	Kota Pematang Siantar	2,85	2,70	3,01	2,85	C
92.	Kota Tidore	2,5	1,30	3,03	2,77	C
93.	Kota Jayapura	1,21	1,84	3,55	2,42	C-
94.	Kota Ternate	NA	3,76	2,93	2,12	C-
95.	Kota Tual	1,38	3,06	2,69	1,97	D

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
96.	Kota Palopo	NA	1,10	2,17	1,64	D
97.	Kota Sungaipenuh	2,04	0,72	1,2	1,32	E

C. KABUPATEN

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
1.	Kabupaten Cilacap	4,64	4,64	4,68	4,65	A
2.	Kabupaten Sidoarjo	4,54	4,75	4,66	4,65	A
3.	Kabupaten Sleman	4,59	4,66	4,63	4,63	A
4.	Kabupaten Jember	4,59	4,75	4,51	4,62	A
5.	Kabupaten Banyumas	4,51	4,71	4,61	4,61	A
6.	Kabupaten Kudus	4,56	4,64	4,63	4,61	A
7.	Kabupaten Sampang	4,33	4,69	4,79	4,60	A
8.	Kabupaten Madiun	4,52	4,75	4,53	4,60	A
9.	Kabupaten Jombang	4,60	4,67	4,52	4,60	A
10.	Kabupaten Sukoharjo	4,43	4,78	4,58	4,60	A
11.	Kabupaten Banyuwangi	4,52	4,72	4,54	4,59	A
12.	Kabupaten Kebumen	4,56	4,68	4,54	4,59	A
13.	Kabupaten Sumedang	4,56	4,57	4,62	4,58	A
14.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4,52	4,70	4,52	4,58	A
15.	Kabupaten Purwakarta	4,65	4,47	4,62	4,58	A
16.	Kabupaten Wonogiri	4,44	4,61	4,68	4,58	A

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
17.	Kabupaten Jepara	4,49	4,55	4,67	4,57	A
18.	Kabupaten Nganjuk	4,53	4,56	4,62	4,57	A
19.	Kabupaten Magetan	4,55	4,58	4,57	4,57	A
20.	Kabupaten Musi Banyuasin	4,52	4,62	4,56	4,57	A
21.	Kabupaten Banjarnegara	4,67	4,49	4,53	4,56	A
22.	Kabupaten Kulonprogo	4,30	4,80	4,59	4,56	A
23.	Kabupaten Garut	4,66	4,28	4,73	4,56	A
24.	Kabupaten Muara Enim	4,51	4,65	4,51	4,56	A
25.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,41	4,65	4,59	4,55	A
26.	Kabupaten Kediri	4,42	4,59	4,64	4,55	A
27.	Kabupaten Pematang	4,50	4,55	4,57	4,54	A
28.	Kabupaten Tapin	4,42	4,51	4,69	4,54	A
29.	Kabupaten Minahasa Selatan	4,46	4,55	4,6	4,54	A
30.	Kabupaten Subang	4,27	4,75	4,58	4,53	A
31.	Kabupaten Deli Serdang	4,47	4,65	4,47	4,53	A
32.	Kabupaten Kuantan Singingi	4,56	4,59	4,44	4,53	A
33.	Kabupaten Wonosobo	4,48	4,67	4,42	4,52	A
34.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	4,35	4,70	4,51	4,52	A
35.	Kabupaten Pasuruan	4,38	4,60	4,57	4,52	A

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
36.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	4,57	4,40	4,57	4,51	A
37.	Kabupaten Boyolali	4,51	4,57	4,45	4,51	A
38.	Kabupaten Musi Rawas	4,41	4,51	4,6	4,51	A
39.	Kabupaten Semarang	4,30	4,56	4,63	4,50	A-
40.	Kabupaten Tulang Bawang	4,38	4,55	4,56	4,50	A-
41.	Kabupaten Banjar	4,32	4,65	4,51	4,49	A-
42.	Kabupaten Tabalong	4,44	4,44	4,59	4,49	A-
43.	Kabupaten Badung	4,44	4,39	4,64	4,49	A-
44.	Kabupaten Sukabumi	4,19	4,75	4,52	4,49	A-
45.	Kabupaten Demak	4,18	4,64	4,6	4,47	A-
46.	Kabupaten Rembang	4,54	4,42	4,44	4,47	A-
47.	Kabupaten Serdang Bedagai	4,29	4,45	4,66	4,47	A-
48.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,87	4,87	4,65	4,46	A
49.	Kabupaten Lampung Tengah	4,35	4,64	4,4	4,46	A-
50.	Kabupaten Pesisir Selatan	4,53	4,39	4,47	4,46	A-
51.	Kabupaten Natuna	4,45	4,45	4,48	4,46	A-
52.	Kabupaten Solok	4,51	4,32	4,55	4,46	A-
53.	Kabupaten Pringsewu	4,68	4,14	4,55	4,46	A-
54.	Kabupaten Banyuasin	4,44	4,51	4,42	4,46	A-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
55.	Kabupaten Tuban	4,30	4,68	4,36	4,45	A-
56.	Kabupaten Pangandaran	4,55	4,75	4,02	4,44	A-
57.	Kabupaten Purbalingga	3,94	4,60	4,78	4,44	A-
58.	Kabupaten Kendal	4,15	4,60	4,56	4,44	A-
59.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4,27	4,56	4,48	4,44	A-
60.	Kabupaten Karanganyar	4,41	4,53	4,35	4,43	A-
61.	Kabupaten Lampung Utara	4,33	4,47	4,47	4,42	A-
62.	Kabupaten Blora	4,55	4,57	4,13	4,42	A-
63.	Kabupaten Grobogan	4,00	4,61	4,62	4,41	A-
64.	Kabupaten Indramayu	4,23	4,72	4,26	4,40	A-
65.	Kabupaten Ogan Ilir	4,17	4,47	4,57	4,40	A
66.	Kabupaten Bengkalis	4,52	4,08	4,56	4,39	A
67.	Kabupaten Tasikmalaya	4,42	4,43	4,29	4,38	A-
68.	Kabupaten Lamongan	4,28	4,78	4,07	4,38	A-
69.	Kabupaten Way Kanan	4,08	4,66	4,38	4,37	A-
70.	Kabupaten Karimun	4,39	4,30	4,42	4,37	A-
71.	Kabupaten Kuningan	4,28	4,42	4,41	4,37	A-
72.	Kabupaten Batang	4,12	4,49	4,49	4,37	A-
73.	Kabupaten Sijunjung	4,41	4,42	4,25	4,36	A-
74.	Kabupaten Bekasi	4,13	4,51	4,43	4,36	A-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
75.	Kabupaten Bogor	4,10	4,52	4,44	4,35	A-
76.	Kabupaten Kutai Kartanegara	4,20	4,39	4,47	4,35	A-
77.	Kabupaten Tegal	4,22	4,68	4,14	4,35	A-
78.	Kabupaten Bandung	4,24	4,28	4,51	4,34	A
79.	Kabupaten Musi Rawas Utara	4,24	4,43	4,36	4,34	A-
80.	Kabupaten Langkat	4,33	4,26	4,44	4,34	A-
81.	Kabupaten Brebes	4,33	4,54	4,12	4,33	A
82.	Kabupaten Lumajang	4,14	4,50	4,35	4,33	A-
83.	Kabupaten Ketapang	4,11	4,39	4,48	4,33	A-
84.	Kabupaten Purworejo	3,70	4,53	4,75	4,33	A
85.	Kabupaten Majalengka	4,30	4,09	4,58	4,32	A-
86.	Kabupaten Indragiri Hilir	4,26	4,54	4,15	4,32	A-
87.	Kabupaten Pesawaran	4,05	4,47	4,43	4,32	A-
88.	Kabupaten Ponorogo	3,97	4,55	4,43	4,32	A-
89.	Kabupaten Minahasa Utara	4,71	4,19	4,03	4,31	A-
90.	Kabupaten Bolaang Mongondow	4,42	4,26	4,23	4,30	A-
91.	Kabupaten Mojokerto	4,33	4,14	4,43	4,30	A-
92.	Kabupaten Pacitan	4,00	4,66	4,23	4,30	A-
93.	Kabupaten Temanggung	4,05	4,10	4,73	4,29	A-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
94.	Kabupaten Ciamis	4,08	4,27	4,53	4,29	A-
95.	Kabupaten Aceh Tamiang	4,16	4,51	4,2	4,29	A-
96.	Kabupaten Padang Pariaman	4,23	4,47	4,17	4,29	A-
97.	Kabupaten Pekalongan	4,44	4,10	4,33	4,29	A-
98.	Kabupaten Tulungagung	4,00	4,34	4,53	4,29	A-
99.	Kabupaten Balangan	4,12	4,53	4,21	4,29	A-
100.	Kabupaten Barito Kuala	4,23	4,46	4,14	4,28	A-
101.	Kabupaten Tanggamus	4,32	4,15	4,35	4,27	A-
102.	Kabupaten Gunung Kidul	4,27	4,30	4,23	4,27	A-
103.	Kabupaten Lima Puluh Kota	4,52	4,32	3,96	4,27	A-
104.	Kabupaten Tanah Datar	3,86	4,40	4,53	4,26	A-
105.	Kabupaten Bangkalan	4,51	4,78	3,49	4,26	A-
106.	Kabupaten Karawang	3,36	4,68	4,74	4,26	A-
107.	Kabupaten Sambas	3,92	4,52	4,34	4,26	A-
108.	Kabupaten Aceh Singkil	4,04	4,48	4,22	4,25	A-
109.	Kabupaten Cirebon	4,30	4,61	3,8	4,24	A-
110.	Kabupaten Pati	4,17	4,21	4,33	4,24	A-
111.	Kabupaten Tanah Laut	3,62	4,43	4,64	4,23	A-
112.	Kabupaten Ngawi	4,41	4,70	3,57	4,23	A-
113.	Kabupaten Bintan	4,35	3,92	4,4	4,22	A-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
114.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	3,32	4,75	4,59	4,22	A-
115.	Kabupaten Bojonegoro	4,04	4,77	3,83	4,21	A-
116.	Kabupaten Kayong Utara	3,90	4,31	4,43	4,21	A-
117.	Kabupaten Nias Utara	4,13	4,31	4,2	4,21	A-
118.	Kabupaten Bone Bolango	3,53	4,52	4,57	4,21	A-
119.	Kabupaten Probolinggo	4,29	3,67	4,65	4,20	A-
120.	Kabupaten Bulungan	4,24	4,20	4,17	4,20	A-
121.	Kabupaten Konawe	4,17	4,53	3,91	4,20	A-
122.	Kabupaten Kepulauan Anambas	3,98	4,03	4,57	4,19	A-
123.	Kabupaten Bantul	4,36	4,1	4,09	4,18	A-
124.	Kabupaten Kubu Raya	3,57	4,34	4,63	4,18	A-
125.	Kabupaten Bireuen	4,30	4,11	4,12	4,18	A-
126.	Kabupaten Rokan Hulu	4,23	4,15	4,15	4,18	A-
127.	Kabupaten Boalemo	3,61	4,34	4,57	4,17	A-
128.	Kabupaten Tangerang	4,37	4,21	3,93	4,17	A-
129.	Kabupaten Klungkung	3,77	4,48	4,22	4,16	A-
130.	Kabupaten Pandeglang	4,11	4,16	4,2	4,16	A-
131.	Kabupaten Cianjur	4,07	4,46	3,94	4,16	A-
132.	Kabupaten Gresik	4,03	4,30	4,14	4,16	A-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
133.	Kabupaten Serang	4,16	4,20	4,1	4,15	A-
134.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	3,86	4,32	4,25	4,14	A-
135.	Kabupaten Siak	3,84	4,26	4,31	4,14	A-
136.	Kabupaten Klaten	4,18	4,14	4,08	4,13	A-
137.	Kabupaten Pasaman	3,68	4,16	4,54	4,13	A-
138.	Kabupaten Blitar	4,26	4,27	3,84	4,12	A-
139.	Kabupaten Bangka	3,92	4,09	4,33	4,11	A-
140.	Kabupaten Bangka Tengah	4,02	4,18	4,14	4,11	A-
141.	Kabupaten Simalungun	4,39	3,96	3,99	4,11	A-
142.	Kabupaten Kutai Barat	3,90	4,19	4,24	4,11	A-
143.	Kabupaten Padang Lawas Utara	3,70	4,15	4,48	4,11	A-
144.	Kabupaten Padang Lawas	4,35	4,08	3,88	4,10	A-
145.	Kabupaten Tabanan	3,81	4,32	4,17	4,10	A-
146.	Kabupaten Kampar	4,13	4,48	3,68	4,10	A-
147.	Kabupaten Pohuwato	4,02	4,09	4,18	4,10	A-
148.	Kabupaten Sanggau	4,07	4,11	4,08	4,09	A-
149.	Kabupaten Aceh Tenggara	4,00	4,04	4,22	4,09	A-
150.	Kabupaten Mesuji	4,06	4,09	4,1	4,08	A-
151.	Kabupaten Empat Lawang	3,80	4,66	3,76	4,07	A-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
152.	Kabupaten Nias	3,45	4,45	4,32	4,07	A-
153.	Kabupaten Gianyar	3,98	4,52	3,7	4,07	A-
154.	Kabupaten Pidie Jaya	4,23	3,42	4,52	4,06	A-
155.	Kabupaten Lebak	4,10	4,13	3,93	4,05	A-
156.	Kabupaten Landak	3,36	4,47	4,31	4,05	A-
157.	Kabupaten Malang	4,29	4,09	3,76	4,05	A-
158.	Kabupaten Paser	3,80	4,56	3,72	4,03	A-
159.	Kabupaten Belitung	4,11	3,97	3,97	4,02	A-
160.	Kabupaten Tojo Unauna	4,09	4,01	3,94	4,01	A-
161.	Kabupaten Minahasa Tenggara	4,28	3,22	4,53	4,01	A-
162.	Kabupaten Belitung Timur	3,92	4,09	4,02	4,01	A-
163.	Kabupaten Indragiri Hulu	4,49	3,55	3,96	4,00	B
164.	Kabupaten Buleleng	3,90	4,08	4	3,99	B
165.	Kabupaten Soppeng	3,72	4,29	3,97	3,99	B
166.	Kabupaten Bener Meriah	3,76	3,90	4,31	3,99	B
167.	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	4,27	3,46	4,24	3,99	B
168.	Kabupaten Lampung Timur	3,72	3,96	4,29	3,99	B
169.	Kabupaten Trenggalek	4,11	3,70	4,07	3,96	B
170.	Kabupaten Mempawah	3,17	4,36	4,34	3,96	B

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
171.	Kabupaten Aceh Tengah	3,79	3,51	4,55	3,95	B
172.	Kabupaten Pinrang	3,86	3,85	4,14	3,95	B
173.	Kabupaten Bengkulu Selatan	3,87	3,93	4,02	3,94	B
174.	Kabupaten Pamekasan	3,89	3,76	4,17	3,94	B
175.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	3,82	3,91	4,05	3,93	B
176.	Kabupaten Polewali Mandar	3,51	4,58	3,68	3,92	B
177.	Kabupaten Aceh Barat	3,56	3,65	4,55	3,92	B
178.	Kabupaten Bangka Selatan	3,80	4,14	3,82	3,92	B
179.	Kabupaten Lampung Barat	3,78	4,10	3,83	3,90	B
180.	Kabupaten Morowali Utara	3,89	3,62	4,18	3,90	B
181.	Kabupaten Kotawaringin Barat	3,81	3,85	4,02	3,89	B
182.	Kabupaten Lahat	3,28	4,61	3,79	3,89	B
183.	Kabupaten Lampung Selatan	3,39	4,06	4,22	3,89	B
184.	Kabupaten Sragen	3,61	4,01	4,02	3,88	B
185.	Kabupaten Labuhan Batu	3,94	4,36	3,33	3,88	B
186.	Kabupaten Bondowoso	4,27	3,55	3,76	3,86	B
187.	Kabupaten Kepahiang	3,50	4,04	4	3,85	B
188.	Kabupaten Solok Selatan	3,52	4,22	3,77	3,84	B

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
189.	Kabupaten Dairi	3,40	3,70	4,38	3,83	B
190.	Kabupaten Lingga	3,29	4,00	4,19	3,83	B
191.	Kabupaten Kaur	3,44	4,15	3,88	3,82	B
192.	Kabupaten Manggarai Timur	4,18	3,84	3,43	3,82	B
193.	Kabupaten Toba	3,71	3,88	3,85	3,81	B
194.	Kabupaten Tana Tidung	3,44	4,06	3,93	3,81	B
195.	Kabupaten Magelang	3,81	4,04	3,57	3,81	B
196.	Kabupaten Simeulue	3,08	4,28	4,06	3,81	B
197.	Kabupaten Tanah Bumbu	3,34	3,89	4,15	3,79	B
198.	Kabupaten Aceh Jaya	3,51	3,86	4,01	3,79	B
199.	Kabupaten Gayo Lues	3,62	3,75	3,98	3,78	B
200.	Kabupaten Karangasem	3,47	3,89	3,92	3,76	B
201.	Kabupaten Nagan Raya	3,96	3,61	3,71	3,76	B
202.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	3,31	3,83	4,11	3,75	B
203.	Kabupaten Penajam Paser Utara	3,68	3,90	3,66	3,75	B
204.	Kabupaten Lombok Tengah	3,25	4,05	3,92	3,74	B
205.	Kabupaten Nunukan	3,74	3,90	3,57	3,74	B
206.	Kabupaten Aceh Utara	3,73	3,60	3,84	3,72	B
207.	Kabupaten Lombok Barat	3,03	3,99	4,13	3,72	B

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
208.	Kabupaten Bantaeng	2,84	4,46	3,85	3,72	B
209.	Kabupaten Berau	4,47	3,64	3,03	3,71	B
210.	Kabupaten Manggarai Barat	3,49	3,85	3,8	3,71	B
211.	Kabupaten Bangka Barat	3,70	3,93	3,48	3,70	B
212.	Kabupaten Aceh Barat Daya	3,15	4,08	3,84	3,69	B
213.	Kabupaten Bone	3,81	3,91	3,35	3,69	B
214.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,34	3,31	4,42	3,69	B
215.	Kabupaten Pidie	3,39	3,85	3,81	3,68	B
216.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3,23	4,16	3,63	3,67	B
217.	Kabupaten Samosir	3,66	3,53	3,81	3,67	B
218.	Kabupaten Pesisir Barat	3,95	2,96	4,08	3,66	B
219.	Kabupaten Gorontalo Utara	3,22	3,66	4,08	3,65	B
220.	Kabupaten Lebong	3,49	3,82	3,65	3,65	B
221.	Kabupaten Jembrana	3,82	3,98	3,15	3,65	B
222.	Kabupaten Bengkulu Utara	4,45	3,33	3,16	3,65	B
223.	Kabupaten Karo	3,95	2,96	3,98	3,63	B
224.	Kabupaten Kotawaringin Timur	3,47	4,67	2,74	3,63	B
225.	Kabupaten Aceh Selatan	3,06	3,98	3,83	3,62	B
226.	Kabupaten Morowali	3,26	3,69	3,92	3,62	B

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
227.	Kabupaten Bima	3,84	3,37	3,64	3,62	B
228.	Kabupaten Raja Ampat	3,74	3,77	3,34	3,62	B
229.	Kabupaten Jenepono	2,93	4,25	3,66	3,61	B
230.	Kabupaten Lombok Timur	3,08	3,82	3,93	3,61	B
231.	Kabupaten Sintang	3,35	3,53	3,94	3,61	B
232.	Kabupaten Katingan	2,88	3,70	4,22	3,60	B
233.	Kabupaten Dompu	3,33	3,22	4,23	3,59	B
234.	Kabupaten Aceh Besar	4,01	3,16	3,56	3,58	B
235.	Kabupaten Konawe Kepulauan	3,30	3,63	3,8	3,58	B
236.	Kabupaten Pakpak Bharat	2,98	3,70	3,97	3,55	B
237.	Kabupaten Seluma	2,91	3,19	4,55	3,55	B
238.	Kabupaten Gowa	3,22	3,64	3,78	3,55	B
239.	Kabupaten Sigi	3,25	3,85	3,52	3,54	B
240.	Kabupaten Pasaman Barat	3,57	3,16	3,77	3,50	B-
241.	Kabupaten Bangli	3,72	3,37	3,39	3,49	B-
242.	Kabupaten Gorontalo	2,83	4,11	3,51	3,48	B-
243.	Kabupaten Konawe Selatan	3,09	3,61	3,75	3,48	B-
244.	Kabupaten Barru	2,92	3,38	4,14	3,48	B-
245.	Kabupaten Banggai Laut	2,98	3,48	3,96	3,47	B-
246.	Kabupaten Tapanuli Utara	3,08	3,92	3,4	3,47	B-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
247.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2,60	3,71	4,02	3,44	B-
248.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2,99	3,35	3,93	3,42	B-
249.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2,89	3,09	4,29	3,42	B-
250.	Kabupaten Sumenep	2,64	3,50	4,12	3,42	B-
251.	Kabupaten Kapuas	2,71	3,87	3,67	3,42	B-
252.	Kabupaten Sinjai	3,09	4,11	3,04	3,41	B-
253.	Kabupaten Kolaka	3,43	3,04	3,76	3,41	B-
254.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	3,13	3,53	3,55	3,40	B-
255.	Kabupaten Aceh Timur	3,28	3,54	3,35	3,39	B-
256.	Kabupaten Buton Utara	3,67	3,53	2,92	3,37	B-
257.	Kabupaten Bulukumba	3,67	3,19	3,22	3,36	B-
258.	Kabupaten Muna	3,27	3,03	3,75	3,35	B-
259.	Kabupaten Lembata	3,13	3,94	2,91	3,33	B-
260.	Kabupaten Pulang Pisau	2,76	3,45	3,77	3,33	B-
261.	Kabupaten Bombana	3,25	3,12	3,6	3,32	B-
262.	Kabupaten Situbondo	3,08	3,35	3,51	3,31	B-
263.	Kabupaten Rokan Hilir	3,24	3,20	3,43	3,29	B-
264.	Kabupaten Banggai	3,02	3,71	3,12	3,28	B-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
265.	Kabupaten Kolaka Timur	3,21	3,01	3,62	3,28	B-
266.	Kabupaten Merangin	2,92	3,45	3,47	3,28	B-
267.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3,41	3,49	2,9	3,27	B-
268.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3,11	3,33	3,36	3,27	B-
269.	Kabupaten Sumba Timur	2,67	3,28	3,85	3,27	B-
270.	Kabupaten Agam	3,26	3,82	2,66	3,25	B-
271.	Kabupaten Muaro Jambi	3,28	2,84	3,57	3,23	B-
272.	Kabupaten Wakatobi	3,27	3,37	3,04	3,23	B-
273.	Kabupaten Bengkayang	3,11	3,85	2,7	3,22	B-
274.	Kabupaten Dharmasraya	4,20	2,41	3,03	3,21	B-
275.	Kabupaten Sekadau	3,48	3,02	3,12	3,21	B-
276.	Kabupaten Pelalawan	2,89	3,46	3,25	3,20	B-
277.	Kabupaten Halmahera Utara	3,29	3,35	2,95	3,20	B-
278.	Kabupaten Malinau	3,27	3,07	3,22	3,19	B-
279.	Kabupaten Konawe Utara	3,08	3,29	3,18	3,18	B-
280.	Kabupaten Asahan	2,90	2,46	4,16	3,17	B-
281.	Kabupaten Kepulauan Meranti	2,71	3,05	3,76	3,17	B-
282.	Kabupaten Parigi Moutong	3,10	3,19	3,23	3,17	B-
283.	Kabupaten Murung Raya	3,05	2,83	3,53	3,14	B-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
284.	Kabupaten Nias Selatan	3,60	1,91	3,88	3,13	B-
285.	Kabupaten Tana Toraja	3,41	2,91	3,05	3,12	B-
286.	Kabupaten Sumbawa	3,05	3,13	3,17	3,12	B-
287.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2,96	2,86	3,52	3,11	B-
288.	Kabupaten Barito Utara	1,55	3,98	3,76	3,10	B-
289.	Kabupaten Banggai Kepulauan	3,00	3,10	3,14	3,08	B-
290.	Kabupaten Tolitoli	2,48	2,80	3,95	3,08	B-
291.	Kabupaten Nias Barat	3,21	2,82	3,18	3,07	B-
292.	Kabupaten Majene	3,13	3,23	2,75	3,04	B-
293.	Kabupaten Lamandau	2,25	3,11	3,72	3,03	B-
294.	Kabupaten Buol	3,66	1,56	3,83	3,02	B-
295.	Kabupaten Sukamara	2,83	3,08	3,13	3,01	B-
296.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	2,91	2,93	3,17	3,00	B-
297.	Kabupaten Sarolangun	2,47	3,01	3,48	2,99	B-
298.	Kabupaten Lombok Utara	2,79	2,11	4,06	2,99	B-
299.	Kabupaten Bungo	2,79	2,95	3,16	2,97	B-
300.	Kabupaten Bandung Barat	3,13	3,26	2,5	2,96	B-
301.	Kabupaten Batu Bara	2,55	3,54	2,79	2,96	B-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
302.	Kabupaten Bengkulu Tengah	3,51	1,95	3,41	2,96	B-
303.	Kabupaten Biak Numfor	2,94	3,05	2,86	2,95	C
304.	Kabupaten Halmahera Timur	2,52	3,19	3,05	2,92	C
305.	Kabupaten Kutai Timur	1,89	3,30	3,52	2,90	C
306.	Kabupaten Takalar	1,89	3,22	3,51	2,87	C
307.	Kabupaten Mamuju	1,73	3,93	2,95	2,87	C
308.	Kabupaten Maluku Barat Daya	2,61	2,58	3,4	2,86	C
309.	Kabupaten Mandailing Natal	2,79	2,44	3,16	2,80	C
310.	Kabupaten Seruyan	2,09	2,19	4,08	2,79	C
311.	Kabupaten Buton Tengah	2,90	2,94	2,46	2,77	C
312.	Kabupaten Tanimbar	2,94	2,36	2,97	2,76	C
313.	Kabupaten Muna Barat	2,59	2,93	2,73	2,75	C
314.	Kabupaten Sabu Raijua	2,97	3,35	1,93	2,75	C
315.	Kabupaten Kolaka Utara	1,61	3,25	3,37	2,74	C
316.	Kabupaten Mamuju Tengah	1,64	3,38	3,18	2,73	C
317.	Kabupaten Melawi	2,45	3,29	2,4	2,71	C
318.	Kabupaten Mappi	2,40	1,83	3,86	2,70	C
319.	Kabupaten Wajo	2,28	2,92	2,89	2,70	C
320.	Kabupaten Merauke	2,86	2,48	2,74	2,69	C

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
321.	Kabupaten Kepulauan Talaud	3,21	-	2,17	2,69	C
322.	Kabupaten Teluk Wondama	2,70	2,69	2,62	2,67	C
323.	Kabupaten Buton Selatan	2,90	2,85	2,22	2,66	C
324.	Kabupaten Pasangkayu	1,91	3,49	2,47	2,62	C
325.	Kabupaten Barito Selatan	1,97	2,94	2,92	2,61	C
326.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2,52	1,40	3,88	2,60	C
327.	Kabupaten Kaimana	2,09	2,62	3,07	2,59	C
328.	Kabupaten Kepulauan Selayar	3,00	2,19	2,56	2,58	C
329.	Kabupaten Rote Ndao	2,45	2,61	2,66	2,57	C
330.	Kabupaten Kotabaru	2,26	2,56	2,82	2,55	C
331.	Kabupaten Maros	2,29	2,35	2,99	2,54	C
332.	Kabupaten Tapanuli Selatan	1,66	2,54	3,42	2,54	C
333.	Kabupaten Tebo	1,39	2,98	3,24	2,54	C
334.	Kabupaten Buru Selatan	2,19	2,38	2,91	2,49	C-
335.	Kabupaten Minahasa	2,61	2,22	2,63	2,49	C-
336.	Kabupaten Sorong	2,27	2,54	2,65	2,49	C-
337.	Kabupaten Batanghari	1,90	3,76	1,66	2,44	C-
338.	Kabupaten Donggala	2,85	2,97	1,48	2,43	C-
339.	Kabupaten Toraja Utara	1,50	2,39	3,41	2,43	C-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
340.	Kabupaten Luwu	2,00	3,19	2	2,40	C-
341.	Kabupaten Mamasa	2,34	2,89	1,93	2,39	C-
342.	Kabupaten Luwu Utara	1,76	1,85	3,53	2,38	C-
343.	Kabupaten Pulau Taliabu	2,10	1,98	3,03	2,37	C-
344.	Kabupaten Kepulauan Aru	2,19	2,83	2,04	2,35	C-
345.	Kabupaten Jayapura	1,14	2,64	3,08	2,29	C-
346.	Kabupaten Sikka	1,48	2,60	2,77	2,28	C-
347.	Kabupaten Tapanuli Tengah	2,02	2,01	2,75	2,26	C-
348.	Kabupaten Halmahera Tengah	1,91	2,08	2,77	2,25	C-
349.	Kabupaten Halmahera Selatan	1,28	2,36	3,06	2,23	C-
350.	Kabupaten Maluku Tenggara	2,25	2,32	2,08	2,22	C-
351.	Kabupaten Alor	1,97	2,57	2,09	2,21	C-
352.	Kabupaten Asmat	1,72	2,45	2	2,06	C-
353.	Kabupaten Halmahera Barat	1,71	2,51	1,66	1,96	D
354.	Kabupaten Ngada	1,67	1,89	2,12	1,89	D
355.	Kabupaten Yahukimo	1,96	2,12	1,56	1,88	D
356.	Kabupaten Belu	1,01	3,48	1,04	1,84	D
357.	Kabupaten Buru	1,00	2,11	2,25	1,79	D
358.	Kabupaten Sidenreng Rappang	2,17	1,65	1,37	1,73	D

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
359.	Kabupaten Sumba Tengah	1,87	1,92	1,38	1,72	D
360.	Kabupaten Enrekang	1,57	1,72	1,72	1,67	D

D. PEMERINTAH DAERAH YANG TIDAK DAPAT DIEVALUASI

No	DAFTAR INSTANSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
1.	Pemerintah Provinsi Papua	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Kota Sawahlunto	NA	NA	NA	NA	NA
3.	Kabupaten Manggarai	NA	NA	NA	NA	NA
4.	Kabupaten Ende	NA	NA	NA	NA	NA
5.	Kabupaten Kupang	NA	NA	NA	NA	NA
6.	Kabupaten Malaka	NA	NA	NA	NA	NA
7.	Kabupaten Sumba Barat	NA	NA	NA	NA	NA
8.	Kab, Seram Bagian Barat	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Kabupaten Rejang Lebong	NA	NA	NA	NA	NA
10.	Kabupaten Mukomuko	NA	NA	NA	NA	NA
11.	Kabupaten Supiori	NA	NA	NA	NA	NA
12.	Kabupaten Deiyai	NA	NA	NA	NA	NA
13.	Kabupaten Mimika	NA	NA	NA	NA	NA
14.	Kabupaten Paniai	NA	NA	NA	NA	NA
15.	Kabupaten Puncak Jaya	NA	NA	NA	NA	NA
16.	Kabupaten Keerom	NA	NA	NA	NA	NA
17.	Kabupaten Pegunungan Bintang	NA	NA	NA	NA	NA

No	DAFTAR INSTANSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
18.	Kabupaten Tolikara	NA	NA	NA	NA	NA
19.	Kabupaten Waropen	NA	NA	NA	NA	NA
20.	Kabupaten Mamberamo Raya	NA	NA	NA	NA	NA
21.	Kabupaten Mamberamo Tengah	NA	NA	NA	NA	NA
22.	Kabupaten Yalimo	NA	NA	NA	NA	NA
23.	Kabupaten Lanny Jaya	NA	NA	NA	NA	NA
24.	Kabupaten Nduga	NA	NA	NA	NA	NA
25.	Kabupaten Puncak	NA	NA	NA	NA	NA
26.	Kabupaten Dogiyai	NA	NA	NA	NA	NA
27.	Kabupaten Intan Jaya	NA	NA	NA	NA	NA
28.	Kabupaten Manokwari	NA	NA	NA	NA	NA
29.	Kabupaten Teluk Bintuni	NA	NA	NA	NA	NA
30.	Kabupaten Sorong Selatan	NA	NA	NA	NA	NA
31.	Kabupaten Tambrauw	NA	NA	NA	NA	NA
32.	Kabupaten Maybrat	NA	NA	NA	NA	NA
33.	Kabupaten Manokwari Selatan	NA	NA	NA	NA	NA
34.	Kabupaten Pegunungan Arfak	NA	NA	NA	NA	NA
35.	Kabupaten Boven Digoel	NA	NA	NA	NA	NA
36.	Kabupaten Sarmi	NA	NA	NA	NA	NA
37.	Kabupaten Fak-fak	NA	NA	NA	NA	NA

Lampiran
Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 659 Tahun 2024

KATEGORI PENILAIAN HASIL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

INDEKS	KATEGORI
4,51-5,00	A
4,01-4,50	A-
3,51-4,00	B
3,01-3,50	B-
2,51-3,00	C
2,00-2,51	C-
1,51-2,00	D
1,01-1,50	E
0,10-1,00	F

Keterangan:

1. ULE adalah singkatan dari Unit Lokus Evaluasi, yaitu Organisasi Penyelenggara yang ditunjuk untuk dilaksanakan PEKPPP.
2. NA adalah singkatan dari Not Available, yaitu kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dievaluasi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kalkulasi nilai sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan evaluasi, sehingga tidak mendapatkan nilai indeks dan tidak masuk dalam kategori yang ada.
3. *NA adalah Not Available yang dikarenakan tidak adanya lokus atau merupakan daerah yang terdampak bencana alam atau kondisi kahar.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,



Nomor : B/144/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kota Jambi**
di
Jambi

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kota Jambi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Jambi. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota Jambi telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan penyesuaian dokumen perencanaan mulai dari Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih berorientasi hasil;
- b. Mengembangkan aplikasi sakup.jambikota.go.id yang memuat dokumen perencanaan dan penjabaran kinerja dari level Kota sampai ke Perangkat Daerah (PD);
- c. Menetapkan IKU PD dengan memuat definisi operasional, sumber data dan formulasi penghitungan yang relevan.
- d. Telah menyusun Peraturan Wali Kota Jambi terkait kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi AKIP di lingkungan pemerintah Kota Jambi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen di bawah ini.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi menunjukkan bahwa nilai sebesar **68,64** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,01	23,09
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,35	19,51
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,73	10,75
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,26	15,29
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,35	68,64
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Jambi tahun 2024 sebagai berikut:

1) **Perencanaan Kinerja**

Pemerintah Kota Jambi telah melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan khususnya pada tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target level Pemerintah Daerah (Pemda) dan PD yang lebih berorientasi hasil/*outcome* dan selaras dengan sasaran strategisnya. Selain itu, telah menyusun rencana aksi pada PD dengan menjabarkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Penjenjangan/*cascading* kinerja pada beberapa PD belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional. Selain itu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- b. Penjenjangan kinerja sebagian PD masih belum mempertimbangkan *cross-cutting* kinerja dengan unit/instansi lain;
- c. Terdapat rumusan sasaran strategis serta indikator kinerja PD yang belum merepresentasikan tugas, fungsi dan isu strategis dari PD tersebut, seperti pada:
 - PK Kepala Dinas Kesehatan belum menetapkan sasaran serta indikator terkait kondisi kualitas kesehatan masyarakat. Kinerja yang ditetapkan baru berfokus pada sasaran terkait dengan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - PK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan baru mencakup satu sasaran, berupa “Meningkatkan Ketahanan Pangan” dengan indikator “Indeks Ketahanan Pangan”. Sedangkan kinerja pertanian belum ada;
- d. Terdapat rumusan sasaran strategis pada level Pemda dan PD yang belum berorientasi *outcome* atau bersifat kegiatan/*output*. Contohnya sasaran “Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Terlantar di Luar Panti” dengan indikator “Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani” pada PK Kepala Dinas Sosial. Selain itu, pada sasaran “Terselenggaranya Pelayanan Penanaman Modal” dengan indikator “Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan” pada PK Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan dan Lingkungan;

- e. Terdapat indikator kinerja PD yang belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup dalam mengukur sasaran kinerja yang telah ditetapkan serta sesuai dengan level jabatannya. Contohnya pada PK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa indikator “Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan” untuk mengukur sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. Selain itu pada PK Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada indikator “Persentase pemberian fasilitasi perizinan” yang mengukur sasaran “Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan, menstabilkan harga barang pokok, pemasaran produk dalam negeri dan pelayanan”.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Jambi telah melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja PD secara berkala. Selain itu, telah mengembangkan aplikasi sakup.jambikota.go.id yang memuat dokumen perencanaan dan penjabaran kinerja dari level Kota sampai ke PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
- b. Pemanfaatan aplikasi sakup.jambikota.go.id belum diintegrasikan secara efektif untuk pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Wali Kota, PD hingga individu pegawai;
- c. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward* dan *punishment*, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kota Jambi.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kota Jambi telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik tingkat Pemda maupun tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah dipublikasikan secara umum melalui *website* resmi Pemerintah Kota Jambi. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Seperti pada PK Wali Kota dengan indikator “Angka Harapan Hidup” yang mendukung sasaran yang mendukung sasaran “Peningkatan Derajat Kesehatan” dengan target tahun 2024 sebesar “73,59” sedangkan

- realisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar “73,89”;
- b. Pada beberapa PD, laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkapkan informasi *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional provinsi maupun secara nasional, seperti pada Dinas Kesehatan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kota Jambi telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP PD. Hasil evaluasi telah dituangkan dalam LHE yang mencakup catatan dan rekomendasinya. Selain itu, telah menyusun Peraturan Wali Kota Jambi terkait kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi AKIP di lingkungan pemerintah Kota Jambi.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak memberikan catatan temuan maupun rekomendasi yang jelas mengenai hasil evaluasi. Informasi temuan yang disajikan sebagian besar hanya berupa daftar dari kriteria evaluasi yang digunakan dan tanpa disertai oleh contoh letak kesalahan. Contohnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh PD;
- c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada setiap PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan rewiu dan perbaikan penjenjangan/*cascading* kinerja pada seluruh PD dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/*cascading* kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- 2) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- 3) Melakukan rewiu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada

masyarakat (*result oriented*) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan karakteristik/tugas organisasi;

- 4) Memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk *monitoring* pencapaian kinerja Wali Kota dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;
- 5) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja PD secara berkala dan mendorong PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- 6) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward* dan *punishment*, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- 7) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
- 8) Menyajikan data *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Jambi maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai sudah berada kondisi mana;
- 9) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- 10) Melakukan *monitoring* atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemda dan PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jambi;
4. Pj. Wali Kota Jambi.